

## **MEDALI BELANDA DAN PENGARUHNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL ELIT JAWA, ABAD XIX-XX: STUDI KASUS PEMBERIAN MEDALI KEPADA PAKUBUWANA X**

**Siska Nurazizah Lestari, Sumarno, Bayu Surindra**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

Balai Pelestarian Niai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: siskanlestari@unpkediri.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penganugerahan berupa bintang jasa oleh Raja Willem I-III dari Belanda kepada elit lokal yang dianggap berjasa kepada Kerajaan Belanda, khususnya Pakubuwana X. Pakubuwana X merupakan Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1893 hingga 1939. Ratu Wilhelmina memberikan bintang kehormatan Sri Maharaja pada tahun 1932 berupa *Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw*. Adapun permasalahan pada penelitian ini yakni mengapa para elit di Hindia Belanda (salah satunya Pakubuwana X) mendapatkan medali penghargaan Belanda?, serta bagaimana pengaruh penganugerahan medali tersebut khususnya bagi kehidupan sosial Pakubuwana X sebagai elit Jawa? Ruang lingkup penelitian yaitu abad XIX-XX. Tahun 1870 merupakan periode awal diberlakukannya penganugerahan *Medaille voor Burgerlijke Verdienste* (Medali untuk Prestasi Warga Sipil). Adapun tahun 1930-an dipilih sebagai periode akhir, karena *Ster voor Trouw en Verdiensten* (Bintang untuk Prestasi Warga Sipil) digantikan oleh beberapa medali yang dikeluarkan oleh kerajaan Jawa, salah satunya di bawah kepemimpinan Pakubuwana X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan sejarah sosial budaya, dan menggunakan metode penelitian sejarah. Bintang tanda jasa tersebut hanya bisa didapatkan oleh golongan orang-orang Eropa saja. Oleh karena itu, pemberian penghargaan tersebut kepada orang-orang pribumi merupakan bentuk apresiasi terhadap masyarakat pribumi. Pengaruh penganugerahan tanda jasa tersebut yaitu kedekatan Pakubuwono X dengan Belanda menyebabkan perusahaan partikelir banyak membuka industri perkebunan sehingga terbuka lapangan kerja rakyat. Di sisi lain, pemberian tanda jasa tersebut membuat Pakubuwono tanduk kepada Belanda dan mempengaruhi beberapa kebijakan untuk rakyat.

Kata kunci: Bintang jasa, Pakubuwana X, medali.

### ***NETHERLANDS MEDALS AND ITS EFFECTS FOR SOCIAL LIFE OF JAVANESE ELITE, XIX-XX CENTURY: CASE STUDY ON THE PROVISION OF MEDAL TO PAKUBUWANA X***

#### ***Abstract***

*This research examines the award with the star form of a service by King Willem I-III from the Netherlands to local elites, who are deemed meritorious to the Kingdom of the Netherlands, especially Pakubuwana X. Pakubuwana X is the King of Surakarta Sunanate who ruled in 1893 to 1939. Queen Wilhelmina awarded Sri Maharaja the honorary star in 1932 it was Grootkruis in de Order van de Nederlandse Leeuw. The problem in this research is why do the elites get the Dutch award medal? And how does the medal award especially affect for Pakubuwana X social life? The scope of this research is in the 1870s to 1920s. 1870 was the initial period for the awarding of the Medaille voor Burgerlijke Verdienste (Medal*

for the Achievement of Civilians). The 1920s were chosen as the final period, because *Ster voor Trouw en Verdiensten* (Stars for Achievement of Civilians) was replaced by several medals issued by the Javanese kingdom, one of which was under the leadership of Pakubuwana X. The approach used in this study was the socio-cultural historical approach, and using historical research methods. These honors can only be obtained by Europeans. Therefore, giving awards to indigenous people is a form of appreciation for indigenous communities. The effect of that honours were the closeness of Pakubuwono X with the Dutch, which led to many private companies opening up plantation industries so that job opportunities were opened for people. On the other hand, the honours made Pakubuwono services should be subject to the Dutch and influenced some policies to the people.

*Keywords: service star, Pakubuwana X, medal*

## I. PENDAHULUAN

Hubungan antara penguasa kolonial Belanda dan elit lokal dari masa ke masa selalu dinamis. Hubungan tersebut membawa pengaruh terhadap budaya Jawa (Indonesia). Perhatian kolonial terhadap komoditas pertanian terutama tahun 1860-an, dan penarikan pajak penduduk pedesaan di Jawa yang diatur dalam sistem sewa tanah menyebabkan para elit lokal, dan beberapa pejabat *binnenlands bestuur* berlomba-lomba mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan proses produksi, tidak terkecuali raja-raja di wilayah *Vorstenlanden* (Maat, 2013: 55-56). Para elit yang berjasa tersebut mendapatkan medali penghargaan dari Kerajaan Belanda sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Pemberian medali (bintang tanda jasa) dan dekorasinya dari Kerajaan Belanda di Jawa sebenarnya telah ada terutama awal abad XIX. Pemberian medali tersebut masih sebatas pemberian medali untuk militer (*militer honours*), berupa brevet, medali, pita, tanda kehormatan pada lengan baju, dan bentuk lainnya. Penghargaan diberikan kepada anggota militer sesuai dengan tingkatan. Sejumlah perwira yang berjasa untuk Belanda baik orang Eropa maupun Jawa mendapatkan penghargaan dengan beragam medali dan dekorasi. Pemberian penghargaan semacam ini umum dilakukan oleh negara-negara yang memiliki wilayah koloni dengan pasukan-pasukan yang dimiliki (James, 1861: 133).

Informasi tentang penganugerahan bintang tanda jasa dalam militer di Jawa dimuat dalam serat yang berjudul *Pratelan Tuwin Pranataning Bintang*. Serat tersebut berupa naskah Jawa yang berisikan tentang penganugerahan bintang jasa yang dibuat oleh Raja Willem I – III dari Nederland (Belanda) untuk anggota militer baik darat maupun laut yang telah dianggap berjasa terhadap Kerajaan Belanda. Serat tersebut mengatur empat tingkatan penghargaan antara lain Bintang *Grutkreis*, Bintang *Kumandur*, Bintang *Dersdheklas* dan Bintang *Pirdheklas* di bawah pemerintahan Raja Willem I. Setiap pertemuan pemakaian bintang harus sesuai dengan aturan yang sudah diberikan dalam sertifikat tersebut dan tidak diperbolehkan dihias dengan emas kecuali sudah diizinkan oleh raja (Winter, 1885).

Pada perkembangannya, penganugerahan penghargaan bintang tanda jasa tidak hanya diberikan dalam bidang militer saja. Belanda juga memberikan penganugerahan bintang tanda jasa untuk warga sipil. Penghargaan tersebut diatur dengan *onderscheidingsteeken* (penghargaan) terhadap masa bakti, kejujuran dan kesetiaan. Warga sipil yang dimaksud yaitu para pegawai negeri sipil

(*volkshoofden* atau *ambtenaar*) non Eropa. Medali tersebut mulai dianugerahkan tahun 1871 dengan nama *Medaille voor Burgerlijke Verdienste* (Medali untuk Prestasi Warga Sipil) yang dibedakan ke dalam 4 kelas (Goltstein, 1876).

Beberapa elit Jawa yang memperoleh medali, antara lain raja di wilayah *vorstenlanden*, para bupati dan pejabat penting lain yang telah berjasa kepada Belanda. Hal ini sangat menarik mengingat pemberian gelar tersebut berpengaruh pada persepsi masyarakat dan kehidupan sosial para elit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan menempuh beberapa proses, yaitu heuristik (pencarian data), kritik intern dan ekstern (triangulasi data), analisis dan sintesis. Ruang lingkup penelitian yakni tahun 1870-an hingga 1920-an. Tahun 1870 merupakan periode awal diberlakukannya penganugerahan *Medaille voor Burgerlijke Verdienste* (Medali untuk Prestasi Warga Sipil). Tahun 1930-an dipilih sebagai periode akhir, karena *Ster voor Trouw en Verdiensten* (Bintang untuk Prestasi Warga Sipil) digantikan oleh beberapa medali yang dikeluarkan oleh kerajaan Jawa, salah satunya di bawah kepemimpinan Pakubuwana X.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat sumber pustaka yang ada (karya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya) untuk mengungkap kebaruan. Salah satunya yakni buku karya Goerge D. Larson yang berjudul “Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta, 1912-1942”. Buku tersebut menjelaskan tentang proses politik, kultur dan sosial yang menjadi akar peristiwa revolusi di Indonesia. Pada bagian awal membahas tentang kedekatan Pakubuwana X dengan gubernemen, serta superioritas yang menunjukkan bahwa beliau menempati kedudukan tertinggi di *vorstenlanden*. Larson menjelaskan bahwa ambisi Pakubuwana X untuk menegaskan kedudukannya sebagai penguasa tradisional sangat kuat (Larson, 1999). Namun demikian, Larson tidak banyak mengungkap secara holistik balas jasa Belanda kepada Pakubuwana X.

Darsiti Soeratman menulis, “Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939”, berisi tentang kehidupan sosial budaya di lingkungan Keraton Surakarta periode 1830 hingga 1939, dari Pakubuwana VII sampai Pakubuwana X. Secara turun-menurun, raja semakin kehilangan kuasanya karena tunduk kepada Belanda. Namun, di mata para kawula, Sunan masih memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan sakral (Soeratman, 1989).<sup>1</sup> Darsiti Soeratman tidak membahas pemberian medali maupun bintang penghargaan secara eksplisit mempengaruhi kekuasaan raja khususnya pada masa kepemimpinan Pakubuwana X.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu tradisi masyarakat feodal di Jawa yang berpegang pada prinsip *katemenan* (kepatuhan dan kesetiaan) untuk mengabdikan pada raja. Pegabdian tersebut tentu saja memberikan benefit pada jabatan maupun penghargaan yang diterima. Semakin tinggi jabatan dan penghargaan yang diperoleh akan semakin meningkat status sosialnya dan semakin banyak pula peran dan keuntungan yang didapat.<sup>2</sup> Prinsip ini terlihat pada kehidupan elit Surakarta, khususnya Pakubuwana X. Medali dan bintang yang diperoleh menyebabkan Pakubuwana X sangat dihormati dan mendapatkan banyak keuntungan terutama bagi Kasunanan Surakarta.

---

1 Soeratman Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa Yogyakarta.

2 Supriadi. 2001. *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi*. Surakarta: Pustaka Cakra, hlm. 124

## II. PEMBERIAN *MEDAILLE VOOR BURGERLIJKE VERDIENSTE* (MEDALI UNTUK PRESTASI WARGA SIPIL) DAN PARA ELIT YANG MEMPEROLEHNYA

Pemberian penghargaan terutama di wilayah Hindia Belanda sebenarnya diatur dalam ketentuan-ketentuan pemberian penghargaan. Salah satunya yakni Dekrit tanggal 26 Oktober 1826, No. 138. Pemberian tanda bintang tersebut ditujukan untuk para prajurit, dan divisi ekspedisi di Jawa dan prajurit lainnya di Hindia. Pemberian penghargaan atau tanda jasa militer antara lain kepada prajurit tanpa subordinasi pangkat, berupa medali oktagon. Pemberian tanda jasa dilakukan secara formal dengan upacara militer. Medali diberikan bersama pita oranye, dengan lebar sekitar tiga jempol orang Belanda. Tanpa adanya pita, medali tersebut tidak dapat dikenakan. Medali dikeluarkan dengan sertifikat cetak, sesuai dengan pemberian bintang tanda jasa pengabdian selama perang di Jawa (Anonim, 1853: 41-44).

Pencetakan medali sepenuhnya menjadi tugas *ad interim Departement voor de Zaken van Koophandel en Koloniën*. Pengiriman medali dilakukan setelah data-data diklarifikasi secara lengkap dan disertai sertifikat. Jika yang dikirim tanda kehormatan, medali memerlukan sertifikat yang tidak terisi ke Letnan Jenderal atau Gubernur Jenderal di Hindia Belanda untuk ditulis langsung ketika memberikan tanda kehormatan (Anonim, 1853: 41-44).

Sertifikat medali pengabdian sub-perwira dan prajurit selama di Jawa disimpan oleh *eskadron* dan dikembalikan kepada pemilik ketika mereka meninggalkan Jawa dengan menunjukkan paspor. Medali menjadi hak milik dan warisan para prajurit. Medali juga bisa dianulir atau dicabut sesuai dengan aturan kerajaan Belanda (Anonim, 1853: 43).

Seperti telah dijelaskan, pemberian penghargaan kepada warga pribumi kalangan sipil di Hindia Belanda (khususnya Jawa) baru dilakukan sekitar tahun 1867 dengan *Medaille voor Burgerlijke Verdienste* (MBV). Penghargaan tersebut mempunyai tingkatan sebanyak empat kelas, yakni *bronzen* (perunggu), *zilveren* (perak), *gouden* (emas), dan medali dalam bentuk kalung berantai emas. Medali-medali tersebut berukuran 50 mm x 50 mm. Pita yang digunakan pada medali memiliki tiga warna, yakni dua buah biru *nassau* dan oranye (menyerupai warna kuning). Adapun tanda penerima medali dicetak di bagian belakang medali (Kesteren, 1885).

Pemerintah Belanda menghapus MBV pada tahun 1893 dan mengeluarkan penghargaan baru yang bernama "*Ster voor Trouw en Verdiensten*" (STV). Gubernur Jenderal van der Wijck dari Hindia Belanda yang mengajukan kepada Pemerintah kerajaan Belanda untuk menghapus *Medaille voor Burgerlijke Verdienste*. Medali tersebut dianggap tidak populer terutama bagi orang-orang pribumi dan sebagian orang Eropa sehingga dihapus pada tanggal 29 Agustus 1893 dan digantikan *Ster voor Trouw en Verdiensten*" (STV) (*Indisch Staatsblad No. 4961*). Medali lama yang diterima melalui penghargaan MBV bisa diganti dengan "*Ster voor Trouw en Verdiensten*" (STV) dengan syarat membayar sejumlah uang. Hal ini berlaku juga bagi para pemegang medali *Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier*, yaitu penghargaan militer yang diberikan kepada para perwira angkatan bersenjata Belanda yang telah menjadi perwira aktif sedikitnya selama 15 tahun. Adapun perubahan yang terjadi pada sistem "*Ster voor Trouw en Verdiensten*" (STV) antara lain pemilik kelas *bronzen* akan mendapat kelas *bronzen ster*, *zilveren* mendapat *zilveren ster*, *gouden* menjadi *kleine gouden ster*, emas dengan rantai emas mendapat *grote gouden ster* (Anonim, 1903).

Pemberian “*Ster voor Trouw en Verdiensten*” (STV) diatur secara lengkap dalam *Bijblad* Nomor 2652, 3179, dan 4158. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penganugerahan STV antara lain:

1. Penerima medali yaitu orang non Belanda yang berjasa dalam membantu pekerjaan pemerintah kolonial. Penerima berhak mendapatkan medali STV berupa emas, perak dan perunggu sesuai dengan aturan. Medali tersebut berbentuk bintang dua belas sudut dengan ujung sudut berbentuk bulat seperti mutiara. Medali tersebut berukuran kecil dan dikenakan di dada sebelah kiri. Pita yang digunakan pada tanda STV memiliki ketentuan sesuai dengan tingkatan bintang tersebut. Penerima medali tidak diperbolehkan menggunakan pita dari medali yang bukan miliknya.
2. Penerima medali yaitu orang Hindia Belanda atau orang non Belanda yang berjasa dalam membantu pekerjaan pemerintah kolonial (dengan aturan yang sama seperti pada ketentuan pertama).
3. Ketentuan *Bijblad* Nomor 2652 menjelaskan bahwa penganugerahan medali STV diberikan kepada para priyayi dan diberikan secara rahasia. Demikian pula dengan upacara penganugerahan yang juga dilaksanakan secara rahasia.
4. Ketentuan *Bijblad* Nomor 2893 menyebutkan, bahwa seseorang yang memperoleh medali STV akan tercabut haknya apabila mendapatkan hukuman mati, atau kerja paksa (dengan memakai rantai). Akan tetapi, apabila seseorang yang memperoleh medali STV mendapatkan hukuman kerja paksa (tidak memakai rantai) maka tanda kehormatannya tidak boleh digunakan selama menjalani masa hukuman (Anonim, 1910: 676-685).
5. Ketentuan *Bijblad* Nomor 3179 menyebutkan, bahwa para priyayi akan mendapatkan penghargaan yang besar jika telah mengabdikan selama 30 tahun. Periode pengabdian tersebut terlalu panjang bagi para priyayi untuk memperoleh penghargaan yang besar, mengingat para priyayi juga harus banyak berkontribusi bagi Belanda. Penghargaan besar dapat diraih dengan ketekunan dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Medali yang dianugerahkan kepada para priyayi sesuai dengan kedudukan dan pangkat mereka. Apabila para priyayi telah mengabdikan dalam jangka waktu yang lama dan sangat berjasa bagi pemerintah kolonial, maka mereka bisa mendapatkan medali emas walaupun pangkatnya berada di bawah bupati. Perlu diingat bahwa pemberian medali tidak boleh terlalu sering. Hal ini akan mengurangi nilai prestise medali tersebut (Anonim, 1910: 676-685).
6. Ketentuan *Bijblad* Nomor 4158 menyebutkan, bahwa medali tidak dikembalikan kepada pemerintah (Belanda) meskipun penerima medali telah wafat (Anonim, 1910: 676-685).

Gubernur Jenderal Carel Herman A. van der Wijck menjadi gubernur pertama yang mengeluarkan “*Ster voor Trouw en Verdiensten*” (STV) pada 1 Januari 1894. Medali tersebut memiliki hierarki sebagai berikut: 1) *Groote gouden ster*, 2) *Kleine gouden ster*, 3) *Zilveren ster*, dan 4) *Bronzen ster*. Pada perkembangannya, ditambahkan lagi satu hierarki yaitu *groote zilveren ster* pada tahun 1929. Sementara itu, *zilveren ster* diubah namanya menjadi *kleine zilveren ster*. Setiap medali mempunyai perbedaan warna (emas, perak dan perunggu), tetapi medali kelas *groote* memiliki hiasan yang berbeda dengan medali lainnya. Usia medali juga ditentukan oleh pencipta lambang kerajaan Belanda. Beberapa simbol yang terdapat dalam medali mencirikan tahun pembuatan medali tersebut. Medali yang dibuat pada tahun 1894 ditunjukkan dengan simbol kepala singa menghadap ke luar. Medali yang dibuat setelah tahun 1907 ditunjukkan dengan simbol kepala singa yang saling berhadapan. Hal ini tidak berlaku untuk kelas *groote* karena lambang singa yang terdapat pada medali tersebut berbeda dengan medali lainnya.

Ukuran medali STV sama dengan ukuran medali MBV (50 mm x 50 mm). Kelas *bronzen ster* pada mulanya tidak memiliki enamel biru. Desain medali *bronzen ster* kemudian direvisi setelah lima belas hari sejak pertama kali diberikan. Warna pita STV pada awalnya sama dengan MBV, pada medali *gouden ster*, terdapat dua buah garis tambahan oranye tua yang terdapat pada sisi terluar pita. Hingga tahun 1945 warna oranye tua pada pita menjadi seperti gelombang, dan jumlah gelombang menentukan kelas medali.

Medali STV berbeda dengan medali MBV karena tidak mencantumkan nama penerima pada medalnya. STV sama halnya dengan medali *Voor Moed en Trouwe*, yakni hanya diberikan kepada kaum non Eropa yang berjasa kepada kerajaan Belanda. STV sangat dikenal oleh masyarakat pribumi, khususnya kaum priyayi (bangsawan). Salah satu contoh penganugerahan STV tertinggi (*Groote Gouden Ster*) diberikan kepada Raden Mas Adipati Ario Koesoemobroto, Bupati Tuban (Anonim, 1941: XIII). Penghargaan diberikan atas jasa, pengabdian dan kesetiaan kepada kerajaan Belanda dengan membantu kinerja residen. Penghargaan juga diberikan kepada Raden Mas Adipati Ario Koesoemobroto, Bupati Tuban (provinsi Jawa Timur), sebuah emas batangan besar atas kesetiaan kepada kerajaan Belanda. Mereka dianggap berjasa memfasilitasi residen dalam setiap kerja, terutama dalam eksploitasi perkebunan. Penganugerahan tersebut diberikan pada peringatan ke-40 tahun pengangkatan tahta Ratu Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau (Anonim, 1941: XIII).

### III. PENGARUH PENGANUGERAHAN MEDALI KEPADA PAKUBUWANA X TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI LINGKUNGAN ELIT

Penganugerahan medali sebagian dilakukan secara rahasia atau juga disaksikan oleh bangsawan dan priyayi. Penganugerahan medali yang dilakukan dengan perayaan biasanya diberikan kepada para bangsawan yang berpengaruh, seperti raja. Salah satu raja di Jawa yang mendapatkan tanda penghargaan berupa medali terbanyak yaitu Pakubuwana X. Pakubuwana mendapatkan beberapa gelar kehormatan dan medali pengakuan yang banyak. Gelar dan medali tersebut diperoleh dari pihak asing yang berwenang memberikan kepada Raja Jawa melalui pejabat kolonial. Adapun penganugerahan medali yang penting bagi Pakubuwana X, antara lain *Grut Kruis ing Ordhe Nederlansen Leyo* atau Salib Agung Ordo Singa (*Orde de Leopold*) Belanda, *Grootekruis van Ridderschap* dari Orde Orange Nassau, Pangkat mayor jenderal pada *Royal Guard* Belanda, *Grootkruis* dari Orde Leopold II Belgia, *Grootkruis* dari Orde Siam, kelas kedua *Ridderschap* dan bintang dari Orde Elang Merah di Prusia, bintang komandan dari Orde Franz Josef di Austria, *Grootkruis* Orde Dua Naga dari Cina yang diucapkan dalam bahasa Jawa “*Dhubbelendrak*”, dan lain-lain. Pemberian gelar kehormatan tersebut dilakukan melalui serangkaian seremonial akbar, yang dihadiri oleh para bangsawan, dan tokoh-tokoh yang memperoleh gelar ksatria yang serupa dari kalangan Eropa (Pemberton, 1994: 93-96).

Gelar kehormatan tersebut ditransliterasikan oleh Abdi Dalem Kapujanggan Keraton Kasunanan Surakarta ke dalam naskah Jawa. Transliterasi gelar kehormatan menjadi salah satu tugas penting bagi abdi dalem sebagai bentuk pengabdian terhadap Kerajaan Kasunanan Surakarta seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa staf *Koninklijke Orde van Verdienste* dengan mentransliterasi gelar yang diberikan oleh negara lain. Gelar-gelar yang telah ditransliterasi ke dalam bahasa Jawa itu disebutkan setiap kali Pakubuwana X mengumumkan hal penting atau mengesahkan peraturan resmi kerajaan.

Gelar-gelar kehormatan menjadi rangkaian panjang yang harus disebut, dan mengisi halaman awal dokumen keraton ketika mengumumkan hal penting atau mengesahkan peraturan resmi kerajaan.

Pada awal abad XX, ordo-ordo kehormatan di dalam keraton diterbitkan dalam dua bahasa. Gelar yang ditulis dalam aksara Jawa dicantumkan dalam kolom sebelah kiri, dimulai dengan kata-kata, “Yang Mulia Pakubuwana”. Pembacaan medali dilakukan beberapa halaman hingga medali tertentu yang dianggap penting, misalnya medali *Dhubbelendrak*. Kolom sebelah kanan, ditulis dalam bahasa Belanda, dengan gelar yang lebih efisien, yaitu “*Zijne Vorstelijke Hoogheid den Soesoehoenan Pakoeboewono Enz. Enz.*” (Yang Mulia Susuhunan Pakubuwana dll.), dilanjutkan oleh halaman-halaman kosong di kolom sebelah kanan (Pemberton, 1994: 93-96).



Pakubuwana X mengenakan seragam KNIL lengkap dengan medali yang diperolehnya.

Sumber: *National Museum van Wereldculturen*

Sebenarnya Belanda secara bertahap mengubah kehidupan masyarakat Jawa melalui aktivitas politik dan ekonomi. Penggolongan ke dalam kelas (bentuk ketidaksetaraan) menjadi ciri kehidupan masyarakat. Orang Eropa menduduki golongan teratas, kemudian diikuti oleh keturunan campuran (orang Eurasia), dan aristokrasi lokal yang terkooptasi. Sebagian besar orang Jawa pada waktu itu menghargai status sosial. Masyarakat khususnya para petani didorong untuk memperlakukan pejabat aristokrat dengan hormat (Lockard, 2006: 532). Hal ini tentu saja berkaitan dengan penghargaan atau tanda jasa yang diberikan oleh Belanda. Kehidupan sosial para elit yang mendapatkan penghargaan tersebut banyak memperoleh kemudahan. Para administrator kolonial dan beberapa bangsawan Jawa hidup dalam kondisi sosial di mana mendorong mereka untuk hidup mewah. Penghargaan yang mereka peroleh menyebabkan mereka lebih dihormati dan secara rutin menerima hadiah dari orang-orang dengan permintaan atau kepentingan khusus, meskipun hadiah tersebut tidak diminta (Rush, 2007: 129). Para elit yang mendapatkan tanda jasa/ bintang juga lebih diterima dalam pergaulan dengan orang Eropa. Hal ini juga terjadi pada kehidupan Pakubuwono X. Penghargaan tanda jasa/ bintang yang diberikan pada akhirnya menyangkal kekuasaan yang nyata. Raja di keraton Jawa lebih fokus pada urusan penyempurnaan budaya tradisional daripada urusan politik terutama terkait hegemoni kerajaan atas Eropa (Lockard. 2006: 532-535).

Pemberian banyak gelar kehormatan kepada Pakubuwana X tidak lepas dari jasa-jasa yang beliau berikan kepada pemerintah kolonial, seperti membantu residen dan gubernur dalam melaksanakan tugas di wilayah koloninya. Bantuan yang diberikan tentu saja mempertimbangkan manfaat yang didapat bagi Kasunanan Surakarta. Intensitas pemberian gelar kepada Pakubuwana X yang lebih banyak dibandingkan elit lainnya di Jawa menyebabkan Pakubuwana X sering mengadakan *tedhak loji* dengan megah. Prosesi khusus dari keraton ke rumah *gupermen* atau residen yang sangat mewah tersebut menjadi sorotan masyarakat. Pakubuwana X tampil dengan megah melakukan *tedhak loji* disertai dengan tanda kebesaran (medali-medali), keluarga kerajaan, dan beberapa Abdi Dalem Kasunanan. Belanda mengambil keuntungan parsial karena kedekatannya dengan Pakubuwana X. Seremoni pertemuan Pakubuwana X dengan pejabat kolonial difasilitasi oleh kebijakan kolonial. Hubungan khusus antara raja-raja di Jawa (wilayah *vorstenlanden*) dan pemerintah kolonial menyebabkan pemerintah kolonial memberikan perlakuan khusus terhadap Pakubuwana tentunya sesuai dengan kontribusi yang diberikan (Pemberton, 1994: 93-96).

*Tedhak loji* maupun seremoni kunjungan pejabat kolonial sarat dengan politik prestise. Dalam hal ini, baik keraton ataupun pemerintah kolonial terlihat harmonis. Namun demikian, sebenarnya ada persaingan antara otoritas Pakubuwanan dan otoritas administrasi Belanda. Masing-masing bergerak secara strategis untuk saling mempengaruhi dalam politik prestise. Keraton dan loji menginterpretasikan istilah-istilah seperti “*King’s Fest*” dan “*Ridderschap (Knighthood) Orde dari Orange-Nassau*” berbeda secara signifikan. Namun tidak berarti bahwa loji atau keraton sepenuhnya memahami sifat saingannya. Selain itu, pada seremonial terdapat keseimbangan antara kedua pihak, yang memberi bobot sama baik bagi perwakilan resmi loji maupun perwakilan keraton.

Ambivalensi keseimbangan kedua otoritas semacam itu tidak menyenangkan *Kangjeng Gupermen* (sebutan orang Jawa terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda). *Kangjeng* sendiri merupakan penghormatan untuk aristokrat tertinggi (maksudnya yaitu Yang Mulia Pemerintah Kolonial Belanda). Adanya penyebutan tersebut berarti mengakui kehadiran *gupermen* yang hampir bisa diberdayakan dan diharapkan dapat menjadi *kangjeng-tudung* (Yang mulia, yang mengayomi, menjaga, dan lain-lain) bagi masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap superioritas pemerintah kolonial di Jawa, namun hanya berlaku bagi *Kangjeng Gupermen* saja yang dianggap dan dipertahankan di Keraton Surakarta (Pemberton, 1994: 93-96).

Banyak perlakuan istimewa yang diberikan oleh penguasa pribumi di *vorstenlanden* kepada residen. Kebaikan tersebut kemudian dibalas dengan penghormatan terhadap raja, seperti yang dilakukan kepada Pakubuwana X. Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana X memandang bahwa penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi atas jasa seseorang, sehingga beliau mencanangkan pembuatan medali untuk orang yang berjasa bagi kerajaan. Dengan demikian, jenis medali yang diberikan oleh Kasunanan beraneka ragam. Medali tersebut kemudian digunakan untuk saling bertukar tanda kehormatan raja dengan pejabat kolonial Belanda. Namun, dalam pertukaran tanda kehormatan tersebut terdapat perbedaan visi. Pakubuwana X memberikan tanda kehormatan kepada residen sesuai dengan protokol atau aturan etiket keraton dalam memberikan penghargaan secara sopan, anggun dan tulus. Sementara itu, residen justru memberikan penghargaan dengan menatap langsung kepada Pakubuwana X seolah-olah itu hanya sebuah penghargaan biasa.



Residen tidak ingin memiliki ikatan emosional secara penuh untuk menghindari resiko politik. Hal ini juga dilakukan oleh gubernur jenderal. Banyak yang beranggapan bahwa Pakubuwana X salah menempatkan posisi, mengingat beliau menganggap residen maupun gubernur sebagai pejabat kolonial yang mempunyai kedudukan penting dalam menentukan kebijakan kolonial. Padahal di atas keduanya terdapat posisi penting yang berhak menentukan semua kebijakan pemerintah Belanda di wilayah koloninya, yaitu Raja Belanda. Baik Raja Willem maupun Ratu Wilhelmina tidak pernah mengunjungi keraton, tidak seperti yang dilakukan kerajaan Inggris terhadap kerajaan di wilayah koloninya. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat Surakarta. Seharusnya Raja Belanda bertemu langsung dengan Raja Kasunanan Surakarta dan memberikan medali sebagai tanda penghormatan yang setara satu sama lain, sehingga tidak timbul prasangka dari masyarakat Surakarta (Pemberton, 1994: 93-96).

Pemberian bintang dengan gelar ksatria kepada Susuhunan Surakarta diterima Pakubuwana X dengan senang hati. Namun, menteri diberikan rekomendasi mempertimbangkan untuk memberikan Susuhunan penghormatan yang lebih rendah daripada ksatria. Beberapa pejabat Belanda khawatir jika Susuhunan memiliki tanda penghormatan yang sama atau bahkan lebih tinggi, berpotensi terhadap kekuatan pengaruh pejabat Belanda ketika bekerjasama dengan Susuhunan Surakarta ataupun berkunjung ke Susuhunan Surakarta. Dengan demikian, timbul kekhawatirannya bahwa penghargaan kepada Susuhunan dapat melemahkan otoritas Belanda di wilayah koloni (dalam hal ini wilayah kekuasaan Susuhunan Surakarta).

J.F.W. van Nes, seorang dewan perwakilan kerajaan Belanda untuk wilayah Hindia Belanda khawatir bahwa pemberian tanda penghormatan kepada Susuhunan akan mengacaukan hierarki yang telah terbangun. Dia tidak setuju bahwa penduduk pribumi pantas mendapatkan medali penghormatan dari Belanda.

Hal tersebut seperti yang diutarakannya berikut ini:

“Seberapapun tingginya penghormatan yang diberikan kepada orang Jawa tidak boleh setara dengan orang Belanda dan bahkan tidak pantas dihormati di atas orang Belanda....”

“.. Jika ingin mempertahankan hukum dan ketertiban, maka harus tetap ada pembagian yang ketat antara kedua negara” (Clark, 2016: 319).

*Kangjeng Gupermen* menunjukkan kekuatan abstraksi yang hampir tak terbatas atas nama residen. Namun demikian, kadang-kadang gubernur jenderal, mengunjungi keraton Surakarta. Tatap muka dari pertemuan semacam itu bersifat publik, terutama saat dilakukan di dalam keraton yang disaksikan oleh bangsawan (keluarga kerajaan, golongan elit), tamu undangan dan abdi dalem. Pertemuan tersebut juga sebagai media dalam pertukaran budaya antara Jawa dan Eropa (Pemberton, 1994: 93-96).

Pemberian tanda penghormatan kepada Pakubuwana X oleh pemerintah Belanda mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya yaitu rekan sesama bangsawan dari India, Jagatjit Singh. Respon tersebut berupa ungkapan pujian terhadap Susuhunan Pakubuwana X. Selain itu Jagatjit Singh juga mengungkapkan bahwa Pakubuwana X sebagai penguasa Jawa memiliki begitu banyak tanda (medali) penghormatan sehingga Pakubuwana X tidak bisa mengenakannya sekaligus. Sementara itu, Jagatjit Singh mengakui bahwa Pemerintah Inggris, tidak berpikiran luas seperti

halnya pemerintah Belanda, mengingat pemerintah Inggris tidak memperkenankan bangsawan India menerima dan memakai medali kehormatan yang berasal dari Inggris atau negara lainnya (Butler, 2017: 235).

Pemberian medali kepada elit Jawa (dalam hal ini Pakubuwana X) juga menginspirasi penciptaan gending-gending (aransemen musik gamelan) kecil di Keraton Susuhunan Surakarta. Gending tersebut berisi ungkapan rasa syukur atas anugerah bintang-bintang penghargaan yang diberikan kepada Paku Buwana X yang ditulis dalam *Serat Panembrama*. Adapun *gending-gending* tersebut dibuat dalam bentuk *Gendhing Ladrang* dan *Ketawang* (Rustopo, 2007: 200).

Pakubuwana X merupakan Raja Surakarta yang paling besar pengaruhnya dan bertakhta selama 46 tahun (1893-1939). Pakubuwana X gemar berbusana mewah dan dilengkapi dengan segala atribut bintang dan lambang kebesaran. Selain itu, Pakubuwana X juga dikenal sangat bijak dalam memerintah. Selama bertakhta, ia mengalami 10 kali pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan 13 kali pergantian Residen Surakarta (Saputra, 2017: 5).

Pakubuwana X menjalin kedekatan dengan pemerintah kolonial. Puluhan penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda maupun negeri Belanda menghiasi busana yang beliau kenakan. Gelar Sri Maharaja dari Ratu Wilhelmina berupa *Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw* menjadi penghargaan paling prestisius yang diterimanya. Penghargaan ini juga menjadi salah satu penghargaan yang mendekatkan Pakubuwana X dengan Belanda, karena menandakan bahwa Pakubuwana X memiliki relasi langsung dengan Ratu Wilhelmina. Hubungan tersebut sangat menguntungkan Surakarta, karena Pakubuwana bisa membangun Surakarta. Hal tersebut tidak lepas dari kepercayaan yang terbangun akibat kedekatan relasi tersebut. Kedekatan relasi juga berdampak pada masuknya perusahaan partikelir (swasta) Belanda di wilayah Jawa, khususnya di bidang perkebunan. Mereka antarlain tergabung dalam *Internationale Handles Maatschappij*, *Nederlandsche Handles Maatschappij* dan *Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden*. Hal tersebut tentunya membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Pakubuwana X membawa kemajuan yang signifikan bagi Kasunanan Surakarta. Raja Kasunanan Surakarta sebelumnya memang menjalin kedekatan dengan Belanda, namun tidak sedekat seperti yang dilakukan oleh Pakubuwana X (Zandvliet, Blusse. 2002: 317).

Pada akhir masa pemerintahan Pakubuwana X, perasaan hormat dan kekaguman serta pelayanan kepada beliau di atas takhtanya mulai berkurang. Oleh karena itu, sering terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya selama Pakubuwana X menjadi raja. Banyak yang mendengar pembicaraan yang kurang menghormati Pakubuwana X terutama setiap kali beliau berkunjung ke kediaman Gubernur Jenderal Belanda. Orang-orang di dalam Keraton Kasunanan banyak yang berkata bahwa beliau bukan lagi raja yang sejati. Sama halnya seperti Mangkunegara, setiap hari dia pergi mengunjungi Gubernur Jenderal. Pada awal kepemimpinan Pakubuwana X, beliau tidak pernah mengunjungi gubernur melainkan gubernur yang selalu mengunjunginya. Selain itu, ketika gubernur ingin berkunjung harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pakubuwana X. Beberapa bangsawan berbisik bahwa "*Kraton Wis Kontjatan Wahyu*" atau keraton sudah kehilangan wibawanya di mata masyarakatnya sendiri (Anderson, 2006: 351).

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemberian anugerah bintang tanda jasa sipil yang dilakukan pemerintah Belanda kepada para elit merupakan bentuk ungkapan terima kasih atas jasa yang diberikan terutama dalam mengabdikan dan bekerja kepada Belanda. Semakin banyak Tanda jasa yang diperoleh dari Kerajaan Belanda secara teoritis membuktikan bahwa elit tersebut memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial. Kedekatan dengan pemerintah kolonial sebenarnya memiliki dua sisi, positif dan negatif. Sisi positif yaitu kepercayaan orang Belanda terhadap para bangsawan atau priyayi (elit lokal). Kepercayaan tersebut berdampak pada masuknya perusahaan partikelir (swasta) khususnya dalam bidang perkebunan di wilayah Jawa. Hal tersebut tentunya membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat melalui industrialisasi pedesaan.

Pemberian medali juga sangat berpengaruh terhadap kondisi Keraton Surakarta, yang dalam hal ini Pakubuwana X sebagai pemimpin yang banyak sekali mendapat anugerah medali dari Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut juga mempengaruhi Pakubuwana X untuk turut serta memberikan medali kepada siapapun yang dianggap berjasa. Situasi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak, serta dianggap sebagai ajang untuk pertukaran budaya, karena penganugerahan tersebut dilakukan melalui seremoni yang dihadiri oleh banyak pihak.

### **B. Saran**

Kajian mengenai Ridderorden atau penganugerahan medali di Hindia Belanda sebenarnya masih sedikit dilakukan, mengingat terbatasnya sumber atau referensi tentang hal tersebut. Namun demikian, kajian ini sangat penting untuk mengungkap bagaimana pemberian penghargaan dilakukan sehingga menjadi bagian dari budaya kerajaan di wilayah Vorstenlanden. Sebagian Ridderorden juga telah ditulis dalam karya sastra Jawa, sehingga sangat menarik jika penghargaan tersebut dapat diuraikan sesuai perspektif orang Jawa. Kajian mendalam mengenai pemberian penghormatan (Ridderorden) sangat penting untuk melihat kemampuan dan kecakapan para elit, dan juga keberpihakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. (2006). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Singapore: Equinox Publishing.
- Anonim (1853). *De Nederlandsche Ridderorden en Onderscheidings- of Eereteekenen. Bevattende de Koninklijke Besluiten, van Derzelver Instellingen en Nadere Bepalingen Hieromtrent Voorgescreven*. De Hague: Koninkrijk van Nederland.
- \_\_\_\_\_ (1903). *Verslag Island Plantentuin*. Bogor: N/A.
- \_\_\_\_\_ (1910). *De Indo-Nederlandsche Wetgeving*. Amsterdam: Elsevier Maatschappij.
- \_\_\_\_\_ (1941). *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie*. Landsdrukkerij: N/A.
- Bax, W. E. (1973). *Ridderorden: Eereteekenen, Draagteekens en Penningen, Betreffende de Weermacht van Nederland en Kolonien (1813-heden)*. Maastricht: A.G van der Dussen BV.
- Brandenburg, H. F.J. (1838). *Beschryving en Afbeeldingen van Nederlandsche Gedenk-penningen Welke Sedert 1813 tot 1938 aan Ryks Munt to Utrecht zijn Geslagen en Verkrijgbaar Gesteld*. Utrecht Robert Natan
- Butler, J. (2017). *Essays on Unfamiliar Travel-Writing: Off the Beaten Track*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Clark, S. (2016). *Distributing Status: The Evolution of State Honours in Western Europe*. Montréal: McGill-Queen's Press.
- Clarke, J. (2000). *Gallantry Medals & Decorations of the World*. South Yorkshire: Pen and Sword.
- Goltstein, V. (1876). *Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao*. Den Haag: Tweede Kamer.
- Hengel, G. H. (1853). *De Nederlandsche Ridderorden en Onderscheidingen of Eereteekenen*. Rotterdam: G H. van Hengel Jr.
- Het Besluit van 29 Augustus 1893 No. 10 Strekkende tot Opheffing van de Medaille voor Burgerlijke Verdienste dalam *Indisch Staatsblad No. 4961*.
- Kesteren, C. E., Sandick, R. A., Meyier J. E. (1885). *De Indische Gids*. Amsterdam: J. H. de Bussy.
- Larson, G. D. (1990). *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lockard, C. (2006). *Societies, Networks, and Transitions: A Global History*. Boston: Cengage Learning
- Maat, H. (2013). *Science Cultivating Practice: A History of Agricultural Science in the Netherlands and its Colonies, 1863–1986*. †Heidelberg: Springer Science & Business Media.
- Meijer, H.G., Mulder, C. P., Wagenaar, B. W. (1984). *Orders and Decorations of the Netherlands*. Venray: eigen uitgave.

- Money, J. W. (1861). *Java, Volume 2*. London: Hurst and Blackett, Publishers, Successors to Henry Colburn
- Pemberton, J. (1994). *On the Subject of "Java"*. Ithaca NY: Cornell University Press
- Rush, J. R.. (2007). *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910*. Equinox Publishing
- Rustopo, T., Suparno, S., Waridi 2007. *Kehidupan Karawitan pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X, Mangkunagara IV, dan Informasi Oral*. Surakarta: ISI Press Surakarta
- Saputra, E. (2016). *Indonesia Poenja Tjerita*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Soeratman, D. (1989). *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa Yogyakarta
- Winter, L.F. (1885). *Serat Pratelan tuwin Pranataning Bintang, terjemahan dari Beschrijving en Statuten der Nederlandsche Ridderorden*. Surakarta: N/A.
- Zandvliet, K., Blusse, L. (2002). *The Dutch Encounter with Asia, 1600-1950*. Amsterdam: Antique Collectors Club Rijkmuseum.

